

## **Dampak Gaya Kepemimpinan Terhadap Efektifitas Perencanaan Pembangunan di Bappeda Provinsi Sumatera Barat**

**Yulia Tri Ananda<sup>1</sup>, Syamsir<sup>2</sup>, Rahmania Amanda Asri<sup>3</sup>,  
Pradini Prima Putri<sup>4</sup>, Salsabillah, Hilmiatur Rahma Hutahayan<sup>6</sup>  
Universitas Negeri Padang**

Email :

[yuliatriananda01@gmail.com](mailto:yuliatriananda01@gmail.com)<sup>1</sup> , [samsyirsaili@yahoo.com](mailto:samsyirsaili@yahoo.com)<sup>2</sup> ,  
[ramandaasri@gmail.com](mailto:ramandaasri@gmail.com)<sup>3</sup> , [pradini1725@gmail.com](mailto:pradini1725@gmail.com)<sup>4</sup> ,  
[yuliaatr07@gmail.com](mailto:yuliaatr07@gmail.com)<sup>5</sup> , [t4560499@gmail.com](mailto:t4560499@gmail.com)<sup>6</sup>

### **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh badan perencanaan pembangunan daerah provinsi Sumatra Barat, serta pengaruhnya terhadap efektivitas perencanaan pembangunan khususnya dalam mengatasi tantangan pembangunan di kota Padang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, dan menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, dan studi literatur untuk memperoleh data yang komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bappeda menerapkan gaya kepemimpinan demokratis, interaktif, dan partisipatif yang mendorong keterlibatan aktif pegawai, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan dalam proses perencanaan pembangunan. Gaya kepemimpinan ini berhasil meningkatkan efektivitas penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan, termasuk dalam mengatasi hambatan klasik seperti pembebasan lahan dan tantangan sosial lainnya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa gaya kepemimpinan yang inklusif, adaptif, dan kolaboratif di Bappeda Kota Padang berperan penting dalam menciptakan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan, partisipatif, serta berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

***Kata Kunci: perencanaan pembangunan, kepemimpinan***

### **ABSTRACT**

The purpose of this study was to analyze the leadership style applied by the regional development planning agency of West Sumatra province, and its influence on the effectiveness of development planning, especially in overcoming development challenges in the city of Padang. The method used in this study was a qualitative method with a descriptive research type, and using in-depth interview techniques, observation, documentation, and literature studies to obtain comprehensive data. The results of the study showed that Bappeda applied a democratic, interactive, and participatory leadership style that encouraged the active involvement of employees, the community, and various stakeholders in the development planning process. This leadership style succeeded in increasing the effectiveness of the preparation, implementation, and evaluation of development programs, including in overcoming classic obstacles such as land acquisition and other social challenges. This study concluded that an inclusive, adaptive, and collaborative leadership style in Bappeda Padang City plays an important role in creating sustainable, participatory development planning that has a positive impact on community welfare.

***Keywords: development planning, leadership***

## PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan merupakan bagian penting untuk memutuskan arah dan tujuan pembangunan suatu wilayah. Terkait situasi ini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumatera Barat memiliki peran strategis untuk merancang, mengkoordinasikan, serta mengawasi pelaksanaan pembangunan di suatu wilayah. Di Kota Padang, Bappeda memiliki tanggung jawab dalam membuat rumusan kebijakan pembangunan yang tepat berdasarkan potensi dan kebutuhan wilayah tersebut, tujuannya adalah untuk memaksimalkan tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Aspek krusial dalam keberhasilan perencanaan pembangunan adalah gaya kepemimpinan Interatif, tidak Otoriter, dan demokratis yang diterapkan oleh kepala Bappeda dan para pemangku kepentingan lainnya. Gaya kepemimpinan ini akan mempengaruhi bagaimana kebijakan dan program pembangunan dirumuskan, diterapkan, serta dievaluasi. Pemimpin yang memiliki gaya kepemimpinan yang tepat, baik itu otoriter, partisipatif, atau transformasional, dapat membawa dampak yang signifikan terhadap kualitas dan efektivitas perencanaan pembangunan yang ada (Hendriani, S., Sari, R. Y., & Gistituati, N. (2024).

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagai lembaga yang berperan dalam menyusun rencana pembangunan daerah, harus memastikan bahwa perencanaan yang dibentuk bukan semata-mata bersifat *top-down* akan tetapi juga melibatkan masyarakat dan stakeholders lainnya. Dengan demikian, gaya kepemimpinan yang diterapkan akan sangat memengaruhi sejauh mana partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dan sejauh mana keberhasilan implementasinya. (Yunina, 2019)

Sebagai contoh, dalam beberapa tahun terakhir, Kota Padang menghadapi berbagai tantangan dalam pembangunan, seperti hambatan yang dihadapi dalam proyek pembangunan sarana prasarana sebagai dampak dari pembebasan lahan pada kasus pekerjaan pengendalian banjir di kawasan air pacah kota Padang. Gaya kepemimpinan Bappeda mempengaruhi sejauh mana mereka dapat mengatasi hambatan-hambatan yang muncul, termasuk masalah pembebasan lahan yang sering menjadi salah satu kendala terbesar dalam proyek infrastruktur. Perencanaan pembangunan yang efektif sangat penting untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran dan sumber daya dalam rangka menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan

masyarakat. Berdasarkan dokumen yang kami lampirkan, terdapat beberapa indikasi yang dapat mengarah pada pendapat mengapa kinerja Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) dapat dinilai tidak efektif dalam konteks proyek pengendalian banjir di Kota Padang:

1. **Koordinasi yang Kurang Efektif:** Dokumen tersebut menyoroti pentingnya koordinasi yang baik antara berbagai pihak terkait dalam pembebasan lahan. Bappeda, sebagai lembaga yang terlibat dalam perencanaan pembangunan, memiliki peran penting dalam mengkoordinasikan berbagai instansi. Jika koordinasi ini tidak berjalan efektif, dapat menghambat proses pembebasan lahan dan pelaksanaan proyek secara keseluruhan.
2. **Perencanaan yang Kurang Antisipatif:** Dokumen menyebutkan bahwa perubahan tata ruang kota Padang, terutama setelah gempa 2009, mempengaruhi perencanaan pengendalian banjir. Bappeda, dalam menyusun rencana pembangunan, seharusnya dapat mengantisipasi perubahan-perubahan tersebut dan dampaknya terhadap kebutuhan infrastruktur, termasuk pengendalian banjir. Jika perencanaan kurang antisipatif, proyek yang dilaksanakan mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan yang berkembang.
3. **Kurangnya Ketegasan dalam Pembebasan Lahan:** Pembebasan lahan menjadi masalah krusial yang menunda proyek. Bappeda, sebagai bagian dari pemerintah kota, mungkin dinilai kurang tegas atau kurang efektif dalam menangani proses ini. Hal ini dapat mencakup kurangnya sosialisasi yang efektif kepada masyarakat, kurangnya rencana kerja yang jelas, atau kurangnya kemampuan dalam mencapai kesepakatan dengan pemilik lahan.

#### **METODE PENELITIAN**

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif. Menurut Creswell (2008) dalam Semiawan adalah sebuah pendekatan atau penelusuran untuk menggali dan memahami fenomena utama. (Semiawan, 2010:2-7) Untuk memahami fenomena utama tersebut peneliti melakukannya dengan teknik pengumpulan data seperti, mewawancarai, observasi, dokumentasi, melakukan studi lapangan, dan studi literatur mengenai objek penelitian tersebut dengan metode wawancara mendalam untuk mengeksplorasi gaya kepemimpinan di Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Provinsi Sumatera Barat. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengalaman, persepsi, serta dinamika interaksi antara pemimpin dan pegawai dalam organisasi. Jenis penelitian yang diterapkan adalah deskriptif, dengan tujuan guna menggambarkan bagaimana gaya kepemimpinan diterapkan, tantangan yang dihadapi, faktor penyebab yang melatarbelakangi tantangan tersebut, serta solusi yang dapat diterapkan guna meningkatkan efektivitas kepemimpinan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Penelitian ini dilakukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumatera Barat, yang terletak di Jalan Khatib Sulaiman No. 10, Kota Padang, Sumatera Barat. Bappeda Sumatera Barat memiliki peran strategis dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan daerah, yang mencakup perumusan kebijakan, perencanaan anggaran, serta pengawasan terhadap pelaksanaan program-program pembangunan di tingkat kota. Lokasi ini dipilih karena merupakan lembaga yang memiliki hubungan langsung dengan implementasi kebijakan pembangunan di Kota Padang, serta menjadi tempat yang relevan untuk meneliti pengaruh gaya kepemimpinan terhadap pembangunan. Adapun alasan pemilihan lokasi ini adalah untuk memperoleh data yang konkret mengenai peran gaya kepemimpinan dalam mendorong keberhasilan program-program pembangunan yang dijalankan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat. Dengan lokasi yang tepat dan relevan, diharapkan penelitian yang dilakukan mampu memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang pengaruh kepemimpinan dalam konteks pembangunan daerah. Subjek dalam penelitian ini adalah pejabat dan staf yang bekerja di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat, Penelitian ini akan fokus pada individu-individu yang terlibat langsung dalam proses perencanaan pengawasan pembangunan daerah, termasuk kepala Bappeda, pejabat struktural di Bappeda, dan staf yang memiliki peran dalam pelaksanaan program-program pembangunan.

Dalam penelitian yang dilakukan, digunakan metode kualitatif untuk menggali informasi mengenai pengaruh gaya kepemimpinan terhadap pembangunan di Bappeda Provinsi Sumatera Barat. Metode pengumpulan data yang diterapkan meliputi wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Ini akan memberikan informasi tambahan yang memperkaya analisis penelitian, serta menyediakan gambaran yang

lebih jelas mengenai bagaimana kebijakan dan keputusan diambil dalam konteks pembangunan daerah.

## **PEMBAHASAN**

### **Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bappeda di Sumatera Barat memperlihatkan komitmen yang mendalam terhadap implementasi gaya kepemimpinan demokratis, sebuah pendekatan yang secara fundamental melibatkan seluruh anggota tim dalam proses pengambilan keputusan yang strategis dan operasional. Keterlibatan ini bukan sekadar formalitas melainkan merupakan bagian integral dari budaya organisasi yang menghargai kontribusi pemikiran dari setiap individu. (Soleman Andryan Dapakuri, 2020) Di Bappeda, mekanisme evaluasi kinerja bulanan yang terstruktur tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengidentifikasi dan memberikan apresiasi kepada pegawai berkinerja terbaik melalui sistem aplikasi yang objektif, namun juga secara aktif mendorong partisipasi setiap anggota tim dalam memberikan umpan balik yang konstruktif kepada pimpinan di tingkat kepala bidang. (K & Riansyah, 2022) Umpan balik ini mencakup spektrum yang luas, mulai dari upaya konkret untuk memperbaiki mutu layanan publik kepada warga masyarakat, penyempurnaan dalam proses perencanaan pembangunan yang visioner dan berkelanjutan, hingga evaluasi mendalam terhadap efektivitas implementasi pembangunan yang sedang berjalan di seluruh pelosok Sumatera Barat.

Lebih lanjut, Bappeda mengadopsi gaya kepemimpinan interaktif sebagai landasan dalam menjalankan roda organisasi. Gaya kepemimpinan ini menempatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebagai pilar utama dalam setiap tindakan dan kebijakan yang diambil (Al Ma'shum, 2022). Dengan berpegang teguh pada aturan yang berlaku, Bappeda menciptakan sebuah lingkungan kerja yang kondusif di mana setiap individu merasa aman dan terhindar dari kekhawatiran akan melakukan kesalahan selama tindakan mereka selaras dengan kerangka regulasi yang telah ditetapkan. Karakteristik esensial dari gaya kepemimpinan interaktif ini adalah adanya ruang yang luas bagi komunikasi dua arah, di mana para pemimpin secara aktif membuka diri untuk mendengarkan dan mempertimbangkan dengan seksama setiap masukan, saran, dan perspektif yang disampaikan oleh para bawahan (Simanjuntak et al., 2020). Dengan demikian, Bappeda menjauhkan diri dari praktik kepemimpinan yang cenderung

otoriter dan lebih memilih pendekatan kolaboratif yang menghargai kontribusi dari berbagai tingkatan organisasi. Sikap terbuka terhadap masukan ini menjadi sangat krusial terutama dalam proses-proses inti seperti perencanaan pembangunan daerah yang membutuhkan pemahaman mendalam tentang kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta dalam evaluasi pembangunan yang memerlukan analisis objektif dari berbagai sudut pandang. (Sayuti et al., 2018)

Sebagai wujud komitmen terhadap inklusivitas dan partisipasi yang lebih luas, Bappeda juga secara aktif melibatkan pihak-pihak eksternal dalam tahapan penyusunan dokumen-dokumen rencana pembangunan daerah, baik yang mencakup startego jangka panjang, taktis jangka menengah, maupun operasional jangka pendek. (Fattah et al., 2017) Keterlibatan aktif dari para pemangku kepentingan di luar lingkungan birokrasi ini dipandang sebagai upaya untuk memperkaya perspektif yang ada, mengakomodasi beragam kepentingan, dan memastikan bahwa rencana pembangunan yang dihasilkan memiliki legitimasi yang kuat serta responsif terhadap kompleksitas kebutuhan masyarakat Sumatera Barat. Selain itu, Bappeda juga memiliki agenda rutin tahunan berupa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dalam prosesnya juga melibatkan partisipasi aktif dari berbagai elemen masyarakat, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta. (Sasmito, 2022)

Dalam konteks perkembangan pemerintahan terkini di Sumatera Barat, muncul sebuah program inovatif yang diberi nama Nagari Kreatif Up. Program ini memiliki visi untuk memberdayakan desa atau nagari sebagai pusat pengembangan potensi daerah yang unik dan beragam (Hanifah & Nurlaila, 2023). Meskipun interpretasi literal desa sebagai pusat pemerintahan mungkin kurang tepat, esensi dari program ini adalah untuk memperkuat peran nagari sebagai fondasi kemajuan daerah dengan merevitalisasi dan melestarikan nilai-nilai adat serta kekayaan budaya Minangkabau yang kaya dan bervariasi di setiap wilayah (Pratama, 2019). Nagari Kreatif Up secara konkret memfasilitasi pembentukan ruang-ruang komunal yang nyaman dan representatif bagi anak-anak muda desa. (Sewang Sewang, 2023) Ruang-ruang ini dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti akses internet gratis yang disediakan oleh pemerintah nagari setempat. Diharapkan, ruang-ruang kreatif ini akan menjadi katalisator untuk meningkatkan kualitas pendidikan non-formal di kalangan pemuda Sumatera Barat,

mendorong tumbuhnya inovasi dan kewirausahaan di tingkat desa, serta memperkuat jalinan kolaborasi antar pemuda dari berbagai nagari yang berbeda.

Pada tingkatan kepemimpinan yang lebih mikro di dalam struktur organisasi Bappeda, kecenderungan terhadap gaya kepemimpinan yang demokratis dan partisipatif menjadi semakin nyata. Para pemimpin di tingkat kepala seksi atau kepala subbidang menunjukkan komitmen untuk senantiasa mendengarkan dan mempertimbangkan dengan seksama setiap pendapat, ide, dan saran yang berasal dari anggota tim tanpa memandang latar belakang atau senioritas. (Musayyada, 2024) Selain itu, mereka juga aktif melibatkan diri secara langsung dalam pelaksanaan berbagai tugas dan kegiatan di Bappeda, memberikan contoh dan motivasi kepada anggota tim sehingga tercipta sebuah lingkungan kerja yang kolaboratif, saling menghormati, dan menjunjung tinggi semangat kerja sama tim yang solid.

### **Bappeda Mengatasi Tantangan dalam Pembangunan Kota Padang**

Gaya kepemimpinan yang interaktif, tidak otoriter, dan demokratis memainkan peran yang krusial untuk mengatasi tantangan pembangunan Kota Padang, terutama dalam konteks peran Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Sumatera Barat. Setiap daerah menghadapi tantangan yang berbeda dalam pembangunan, dan dalam kasus Kota Padang, tantangan tersebut meliputi masalah infrastruktur, kemiskinan, ketimpangan sosial, pengelolaan lingkungan, serta ancaman peristiwa alam seperti gempa bumi dan banjir. Sehingga, pemilihan gaya kepemimpinan yang tepat menjadi kunci utama dalam memastikan bahwa proses pembangunan tersebut tidak hanya efektif, tetapi juga dapat menciptakan dampak yang berkelanjutan dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini, gaya kepemimpinan yang interaktif, tidak otoriter, dan demokratis memungkinkan adanya keterlibatan aktif dari seluruh elemen masyarakat, memfasilitasi pengambilan keputusan yang lebih transparan dan akuntabel, serta membuka ruang untuk inovasi yang dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada. (Ajizah et al., 2021)

Salah satu aspek terpenting dari gaya kepemimpinan yang demokratis dan interaktif adalah mendorong partisipasi aktif dari masyarakat. Dalam pembangunan Kota Padang, hal ini sangat vital, karena pembangunan yang baik harus mampu mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Kepemimpinan yang bersifat interaktif

memungkinkan pemimpin dan pengambil kebijakan untuk lebih dekat dengan masyarakat, mendengarkan langsung keluhan, harapan, dan ide-ide yang dimiliki oleh warga. Proses ini tidak hanya terbatas pada serangkaian survei atau diskusi formal, tetapi juga pada partisipasi langsung pada saat merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi aturan pembangunan. Misalnya, dalam perencanaan pembangunan infrastruktur seperti jalan, transportasi umum, atau pengelolaan sampah, pemerintah Kota Padang dapat melibatkan masyarakat dalam forum diskusi atau musyawarah desa, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih tepat sasaran dan tidak mengabaikan kebutuhan lokal. (Al Ma'shum, 2022)

Lebih jauh lagi, gaya kepemimpinan demokratis juga menyediakan peluang untuk pihak berkepentingan untuk berperan dalam pengambilan keputusan yang bersifat jangka panjang. Pembangunan Kota Padang, yang memiliki keanekaragaman sosial dan budaya, membutuhkan wawasan yang mendalam tentang konteks lokal. Bappeda, dengan gaya kepemimpinan yang demokratis, dapat memastikan bahwa kebijakan pembangunan yang diambil mempertimbangkan semua aspek, baik itu aspek sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan. Proses ini menjadi lebih inklusif karena setiap suara dianggap penting, baik itu dari kalangan masyarakat miskin, kelompok marginal, maupun masyarakat umum. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan, Bappeda dapat merancang program pembangunan yang lebih responsif dan berdasarkan realita di lapangan.

Selain itu, gaya kepemimpinan yang tidak otoriter memberikan keleluasaan bagi pemerintah untuk bekerja sama dengan beberapa pihak, diantaranya masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dunia usaha, maupun pemerintah pusat. Dalam konteks pembangunan Kota Padang, banyak tantangan yang tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah daerah sendirian. Misalnya, masalah pengelolaan sampah atau pembangunan infrastruktur transportasi yang memadai membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Dengan membuka ruang untuk kolaborasi ini, Bappeda Sumatera Barat dapat lebih mudah mencari solusi bersama yang lebih holistik dan berkelanjutan. Kepemimpinan yang tidak otoriter juga mengurangi potensi konflik dan ketegangan antara pemerintah dan masyarakat. Ketika keputusan tidak dipaksakan, tetapi diambil melalui musyawarah dan kesepakatan bersama, masyarakat



lebih cenderung untuk mendukung kebijakan yang diambil, bahkan jika kebijakan tersebut memerlukan perubahan atau penyesuaian dalam kehidupan mereka.

Selain itu, salah satu tantangan besar dalam pembangunan Kota Padang adalah pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Kota Padang terletak di daerah rawan gempa bumi dan memiliki potensi peristiwa alam lainnya, seperti banjir dan tanah longsor. Dalam menghadapi tantangan-tantangan ini, gaya kepemimpinan demokratis dapat membantu Bappeda (Mustaqim & Pardana, 2022) dalam merancang kebijakan pembangunan yang bukan hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, akan tetapi juga keberlanjutan lingkungan dan mitigasi risiko bencana. Proses perencanaan yang inklusif memungkinkan untuk memasukkan pertimbangan tentang bagaimana membangun infrastruktur yang tahan bencana atau bagaimana melibatkan masyarakat dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan. Misalnya, dalam pembangunan perumahan atau kawasan wisata, Bappeda dapat bekerja sama dengan ahli lingkungan, perencana kota, serta masyarakat lokal untuk menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bencana.

Kepemimpinan yang interaktif juga berperan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Ketika pengambilan keputusan dilakukan secara terbuka, masyarakat memiliki kesempatan untuk mengetahui proses, alasan, dan tujuan dari kebijakan yang diambil. Hal ini sangat penting, terutama ketika menyangkut anggaran publik dan pengelolaan sumber daya alam yang rentan disalahgunakan. Dengan adanya keterbukaan informasi, masyarakat dapat ikut mengawasi jalannya pembangunan, memberikan masukan, dan menjamin kebijakan yang diterapkan pasti mendukung kepentingan masyarakat luas, bukan hanya segelintir pihak. Misalnya, dalam proyek pembangunan infrastruktur, transparansi dalam penggunaan anggaran dan pelaksanaan proyek dapat mencegah terjadinya korupsi atau penyalahgunaan wewenang, serta meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Gaya kepemimpinan demokratis dan interaktif juga mendorong inovasi dan adaptasi yang lebih cepat terhadap perubahan yang terjadi. Pembangunan Kota Padang tidak bisa terlepas dari perubahan zaman, baik itu dalam hal teknologi, pola konsumsi, atau pola hidup masyarakat. Kepemimpinan yang terbuka terhadap ide-ide baru dan solusi kreatif akan membantu Bappeda untuk mengatasi berbagai masalah yang muncul, termasuk bagaimana mengurangi kemacetan lalu lintas, meningkatkan kualitas pendidikan, atau mengurangi angka pengangguran. Misalnya, dengan mengadopsi teknologi informasi

dalam pelayanan publik, Bappeda dapat menciptakan sistem yang lebih efisien dan ramah pengguna, seperti aplikasi untuk memantau perkembangan proyek atau untuk melaporkan masalah infrastruktur secara langsung. Dengan memanfaatkan inovasi teknologi, Kota Padang dapat lebih maju saat menyediakan layanan bagi warga masyarakat.

Terakhir, gaya kepemimpinan yang demokratis dan interaktif dapat membantu mengurangi ketegangan sosial dan menciptakan kohesi sosial di tengah masyarakat. Saat masyarakat terlibat dalam penentuan keputusan, akan muncul perasaan lebih dihargai dan dihormati, sehingga mereka akan lebih mendukung kebijakan pemerintah. Hal ini sangat penting dalam konteks Kota Padang yang memiliki keragaman etnis dan agama. Ketegangan sosial yang timbul akibat ketidakpuasan terhadap kebijakan atau pembangunan dapat diminimalisir dengan pendekatan kepemimpinan yang melibatkan seluruh pihak pada proses merencanakan dan melaksanakan pembangunan. Sehingga gaya kepemimpinan ini selain berfungsi untuk meraih tujuan pembangunan, juga menciptakan hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat.

Secara keseluruhan, gaya kepemimpinan yang interaktif, tidak otoriter, dan demokratis sangat membantu Bappeda Sumatera Barat dalam mengatasi tantangan pembangunan di Kota Padang. Dengan pendekatan ini, pembangunan yang dilaksanakan akan lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan. Gaya kepemimpinan ini memungkinkan terciptanya proses pembangunan yang dapat menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan memitigasi risiko bencana. Dengan mengutamakan partisipasi masyarakat, transparansi, serta inovasi, Bappeda dapat menciptakan kebijakan yang lebih responsif terhadap tantangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

### **Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Efektivitas Perencanaan Pembangunan**

Gaya kepemimpinan yang diterapkan di Bappeda Kota Padang memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas perencanaan pembangunan, baik dari segi penyusunan, pelaksanaan, maupun evaluasi rencana pembangunan itu sendiri. Pemimpin yang memimpin Bappeda Kota Padang mengadopsi gaya kepemimpinan yang demokratis dan kolaboratif, yang memungkinkan berbagai pihak terlibat dalam setiap proses perencanaan. (Sewang Sewang, 2023) Gaya kepemimpinan ini mendorong adanya partisipasi aktif dari pemangku kepentingan, baik dari internal instansi, perangkat

daerah lainnya, maupun masyarakat sipil. Dengan melibatkan banyak pihak dalam perencanaan, Bappeda Kota Padang dapat merancang rencana pembangunan yang spesifik dan sesuai dengan keperluan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam proses ini juga meningkatkan rasa tanggung jawab bersama terhadap pelaksanaan program, yang pada gilirannya berkontribusi pada keberhasilan implementasi di lapangan.

Salah satu contoh nyata dari gaya kepemimpinan ini adalah pelaksanaan program-program berbasis lokal seperti Nagari Kreatif Up. (Karsiman, 2018) Program ini menunjukkan bagaimana pemimpin di Bappeda Kota Padang dapat membaca potensi lokal dan menggerakkan partisipasi masyarakat, terutama generasi muda, dalam pembangunan daerah. Kepemimpinan yang visioner ini tidak hanya mengacu pada regulasi yang ada, tetapi juga peka terhadap dinamika sosial budaya masyarakat Sumatera Barat, khususnya di Kota Padang. Pemimpin yang responsif terhadap perubahan dan kebutuhan lokal mampu menciptakan program yang relevan dengan kondisi sosial masyarakat, serta memberdayakan warga untuk berperan aktif dalam proses pembangunan.

Selain itu, gaya kepemimpinan yang fleksibel dan adaptif juga sangat krusial untuk menghadapi dinamika di lapangan. Perubahan yang tak terduga dalam pelaksanaan pembangunan seringkali mengharuskan penyesuaian cepat terhadap rencana yang telah disusun. (Indriasari et al., 2020) Kepemimpinan yang tidak otoriter dan terbuka terhadap masukan memungkinkan perubahan dan penyesuaian dilakukan secara efisien, tanpa melalui birokrasi yang berbelit-belit. Pemimpin yang mendengarkan masukan dari bawah dapat dengan cepat mengidentifikasi masalah yang muncul dan melakukan perbaikan, sehingga proses pembangunan berjalan lebih efisien dan terarah.

Dalam hal pengawasan dan evaluasi, gaya kepemimpinan yang terbuka terhadap kritik dan evaluasi konstruktif juga sangat mempengaruhi efektivitas perencanaan pembangunan. (Munawaroh & Daryana, 2021) Sistem monitoring yang transparan memungkinkan adanya umpan balik yang berharga untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program. Ketika pemimpin menyambut kritik dengan sikap yang konstruktif, maka kesalahan dan kekurangan dalam pelaksanaan perencanaan dapat segera diperbaiki. Hal ini juga meningkatkan akuntabilitas publik terhadap kinerja

Bappeda Kota Padang sebagai lembaga perencana. Dengan pengawasan yang transparan, masyarakat dapat memantau perkembangan program pembangunan secara langsung, yang pada gilirannya memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Kepemimpinan yang sukses di Bappeda Kota Padang tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga membangun sinergi antarinstansi yang lebih baik. Koordinasi yang kuat antara Bappeda dan perangkat daerah lainnya memastikan bahwa setiap program pembangunan dapat berjalan dengan lancar, tanpa adanya tumpang tindih atau fragmentasi. Kepemimpinan yang mampu Mengkoordinasikan keterlibatan pihak lain sangat krusial untuk menjamin bahwa perencanaan pembangunan tidak hanya terfokus pada satu sektor, tetapi juga bersinergis antara program satu dengan lainnya.(Irdyanti, 2021)

Sinergi yang terbangun juga berkontribusi pada peningkatan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Kepercayaan masyarakat terhadap program pembangunan sangat dipengaruhi oleh bagaimana pemerintah menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi setiap kebijakan dan program yang ada. Pemimpin yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan memiliki visi yang jelas tentang masa depan daerah mampu membangun hubungan yang lebih baik dengan publik, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.(Karya Pamungkas & Arif Purnomo Aji, 2022) Dengan demikian, kepemimpinan yang demokratis, kolaboratif, dan adaptif di Bappeda Kota Padang telah menjadi faktor kunci dalam menciptakan perencanaan pembangunan yang lebih efektif, berkelanjutan, dan berpengaruh positif bagi masyarakat.

Secara keseluruhan, gaya kepemimpinan yang diterapkan di Bappeda Kota Padang telah menunjukkan bagaimana sebuah lembaga perencanaan pembangunan dapat berjalan dengan efektif, berkat penerapan prinsip-prinsip kepemimpinan yang inklusif, fleksibel, dan visioner(Tovalini & Hanoselina, 2021). Pemimpin yang mampu mengarahkan sumber daya secara optimal dan inklusif, serta menciptakan ruang bagi partisipasi masyarakat, akan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang bukan hanya relevan dengan regulasi yang ada, tetapi juga bisa menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata. Dengan pengawasan yang transparan, koordinasi yang baik antarinstansi, dan kepercayaan publik yang tinggi, Bappeda Kota Padang berhasil

menciptakan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak positif, memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Kota Padang.

## **KESIMPULAN**

Gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh Bappeda Provinsi Sumatera Barat bersifat demokratis, interaktif, dan partisipatif, yang mampu menciptakan suasana kerja yang terbuka, inklusif, dan kolaboratif. Pendekatan ini tidak hanya mendorong keterlibatan aktif dari seluruh elemen organisasi, tetapi juga memungkinkan proses pengambilan keputusan dilakukan secara lebih objektif, transparan, dan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat dan mitra eksternal. Hal ini diperkuat dengan penggunaan sistem evaluasi kinerja yang berbasis data, sehingga kinerja pegawai dapat dinilai secara adil dan terukur.

Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan juga menjadi bagian penting dari gaya kepemimpinan ini. Program seperti Nagari Kreatif Up menjadi salah satu contoh konkret bagaimana kepemimpinan yang partisipatif dapat mendorong inovasi dan pemberdayaan di tingkat desa, terutama bagi generasi muda. Dengan pendekatan yang responsif dan adaptif terhadap kebutuhan riil masyarakat, Bappeda mampu merancang kebijakan pembangunan yang tidak hanya berkelanjutan, tetapi juga berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Sumatera Barat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Azmy, A. (2021). *Teori dan dasar kepemimpinan*, Makassar. Erlangga.
- Erlangga, H. (2018). *Kepemimpinan dengan spirit technopreneurship*. Bandung: FISIP UNPAS Press.
- Wulandari, A., & Mulyanto, H. (2024). *Kepemimpinan* (M. Yuliza, Ed.). Bekasi, Jawa Barat.
- Nainggolan, L. E., Johanis, A. R. M., Firdaus, dkk (2023). *Perencanaan pembangunan*. Yayasan Kita Menulis.
- Usman, H. (2019). *Kepemimpinan efektif: Teori, penelitian, dan praktik* (Cetakan pertama). Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Hendriani, S., Sari, R. Y., & Gistituati, N. (2024). Pengaruh gaya kepemimpinan terhadap efektivitas pengambilan keputusan. *Jurnal Niara*, 17(1), 171-184.
- Lotje, N., Sumayku, S. M., & Sambul, S. A. P. (2017). Pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan pada PT. Asuransi Bumida Bumiputera Muda Cabang Amando. *Jurnal Universitas Sam Ratulangi (Unsrat)*.

- Harlofida, D. (2018). Pengaruh gaya kepemimpinan terhadap efektivitas kerja karyawan pada Koperasi Bina Langgeng Belitang Ogan Komering Ulu Timur. *Jurnal Aktual STIE Trisna Negara*, 16(2), 117-126.
- Ajizah, S. N., Wijaya, E., & Meutia, F. (2021). PERAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KOTA DEPOK DALAM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH. *JLR - Jurnal Legal Reasoning*, 4(1). <https://doi.org/10.35814/jlr.v4i1.2966>
- Al Ma'shum, N. H. H. S. D. A. (2022). Analisis Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sumatera Utara (Bappeda SU). *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi, Dan Manajemen*, 2.
- Fattah, M. A., Afifuddin, M., & Munir, A. (2017). Evaluasi Jalur Evakuasi Di Bappeda Aceh. *Jurnal Teknik Sipil*, 6(2).
- Hanifah, L., & Nurlaila, N. (2023). Efektivitas Kinerja BAPPEDA Dalam Perencanaan Pembangunan Kota Medan. *Cakrawala Repositori IMWI*, 6(1). <https://doi.org/10.52851/cakrawala.v6i1.186>
- Indriasari, H. P., Utari, W., & Mardi W., N. (2020). PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN, KOMITMEN DAN KOMUNIKASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI BAPPEDA KABUPATEN BOJONEGORO. *Jurnal Mitra Manajemen*, 4(3). <https://doi.org/10.52160/ejmm.v4i3.365>
- Irdyanti. (2021). Kepemimpinan Demokratis. *Universitas Negeri Makasar*, 1886.
- K, K., & Riansyah, T. F. (2022). Analisis Yang Mempengaruhi Ketetapan Waktu Dalam Pelaporan Keuangan BAPPEDA Sumatera Utara dan Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Manajemen Malahayati*, 11(3). <https://doi.org/10.33024/jrm.v11i3.6385>
- Karsiman, K. (2018). GAYA KEPEMIMPINAN DEMOKRATIS GABRIEL ASEM (STUDI KEPEMIMPINAN BUPATI TAMBRAUW PAPUA BARAT). *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(2). <https://doi.org/10.33506/jn.v3i2.112>
- Karya Pamungkas, T., & Arif Purnomo Aji, F. (2022). Analisis Gaya Kepemimpinan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember. *JURNAL PARADIGMA MADANI*, 9(2). <https://doi.org/10.56013/jpm.v9i2.1767>
- Munawaroh, N., & Daryana. (2021). Gaya Kepemimpinan Kepala Dinas Dalam Meningkatkan Disiplin Pegawai Di Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal JISIPOL*, 5(April).
- Musayyada, Y. (2024). Peran BAPPEDA Dalam Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Di Kabupaten Pati. *Majalah Ekonomi*, 28(02). <https://doi.org/10.36456/majeko.vol28.no02.a8040>
- Mustaqim, F., & Pardana, D. (2022). Evaluasi Penilaian Aktiva Tetap menurut Standar Akuntansi Pemerintah pada Kantor Bappeda Kota Baubau. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen*, 5(1). <https://doi.org/10.35326/jiam.v5i1.2138>
- Pratama, N. Z. (2019). Study Kualitatif Pencak Silat Aliran Luncua Di Nagari Pauh Duo Nan Batigo. *Jurnal Olahraga Indragiri (JOI)*, 5(2).
- Sasmito, Y. (2022). Analisis Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) di Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 21(1). <https://doi.org/10.35967/njip.v21i1.262>
- Sayuti, S., Majid, J., & Juardi, M. S. S. (2018). Perwujudan Nilai Transparansi,

- Akuntabilitas dan Konsep Value For Money dalam Pengelolaan Akuntansi Keuangan Sektor Publik (Studi Pada Kantor BAPPEDA Sulawesi Selatan). *ATESTASI : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(1). <https://doi.org/10.33096/atestasi.v1i1.39>
- Sewang Sewang. (2023). Pengaruh Budaya Organisasi dan Gaya Kepemimpinan terhadap Kepuasan Kerja Pegawai Bappeda Kabupaten Jeneponto. *Public Service and Governance Journal*, 4(2). <https://doi.org/10.56444/psgj.v4i2.919>
- Simanjuntak, L. A., Manossoh, H., & Rondonuwu, S. (2020). EVALUASI LAPORAN KINERJA INSTITUSI PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) PROVINSI SULAWESI UTARA. *GOING CONCERN : JURNAL Riset AKUNTANSI*, 15(3). <https://doi.org/10.32400/gc.15.3.29695.2020>
- Soleman Andryan Dapakuri. (2020). Fungsi Bappeda Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah (Studi Di Bappeda Kabupaten Sumba Barat). *Journal of Chemical Information and Modeling*.
- Tovalini, K., & Hanoselina, Y. (2021). Kepemimpinan Sektor Publik: Studi Mengenai Gaya Kepemimpinan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Kota Padang. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic*, 5(2). <https://doi.org/10.36057/jips.v5i2.485>
- Yunina, F. (2019). ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) ACEH TENGAH. *Jurnal Akuntansi Muhammadiyah*, 9(1). <https://doi.org/10.37598/jam.v9i1.647>